



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

SKPD	: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PA	: HERRY FAKHRIZAL, S.T
PPTK	: SRI DEWI, SE
NAMA KEGIATAN	: PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
NAMA SUB KEGIATAN	: PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

I. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang panjang sebagai bangsa yang merdeka. Sejarah perjuangan bangsa sudah dimulai sejak zaman pendudukan Hindia Belanda atas Indonesia. Perjuangan rakyat tersebar di tiap daerah kepulauan. Perjuangan rakyat muncul dari berbagai suku dan etnis yang wilayahnya diduduki oleh Belanda. Perjuangan rakyat Indonesia berlanjut setelah proklamasi kemerdekaan saat Belanda melancarkan agresi militer. Setelah perjuangan yang panjang melalui militer dan diplomatik, akhirnya rakyat Indonesia bisa menikmati kedamaian sebagai suatu Bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ancaman bangsa ini tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga berasal dari dalam negeri. Berbagai konflik bahkan pemberontakan dalam negeri pernah terjadi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah menjaga integritas bangsa ini dari ancaman pengaruh luar dan dalam negeri. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diimplementasikan melalui menghormati perbedaan, semangat untuk bersatu, rela berkorban dan pantang menyerah serta adanya harga diri dan jiwa nasionalisme.

Penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis, agama, dan bahasa yang berbeda dengan latar belakang dan golongan tengah mengalami ujian berat akibat arus globalisasi yang mulai menggerus nilai-nilai kebangsaan dan berganti dengan pola hidup yang individualistik dan mengagungkan kebebasan. Kehadiran FPK sangat dibutuhkan untuk kebutuhan NKRI yang sangat rentan terhadap konflik. Perlu pembauran antarsuku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik. Sekecil apapun persoalan sosial harus segera terselesaikan agar tidak menjadi besar.

Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah mengamanatkan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Pembentukan FPK dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemda, serta memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. Pemerintah menyadari bangsa Indonesia yang multikultural dan terdiri atas berbagai suku, ras, dan etnis, dengan berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, dan agama sangat berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan, serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembauran Kebangsaan merupakan proses penting yang dapat meningkatkan kesadaran dan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pemantapan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bakesbangpol sebagai mitra FPK mempunyai tugas menjalin komunikasi yang efektif dengan FPK guna menyelaraskan informasi terkait isu-isu perpecahan dan disintegrasi bangsa. Menjalinkan tali silaturahmi dengan para tokoh masyarakat yang tergabung dalam FPK menjadi kunci keberhasilan dalam menjaring aspirasi

masyarakat. Peran para tokoh sangat besar dalam menciptakan keadaan yang kondusif dan aman dalam kehidupan masyarakat.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud dari kegiatan ini adalah:

1. Melakukan koordinasi antara Pengurus FPK Kabupaten yang terdiri dari perwakilan paguyuban-paguyuban yang berasal dari kelompok suku/ras yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya menciptakan komunikasi yang selaras sebagai mitra dan meningkatkan kesadaran di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
2. Pemerintah daerah melalui Bakesbangpol memberikan bantuan dana hibah kepada FPK untuk pemantapan dan penguatan paguyuban yang ada di FPK itu sendiri.

b. Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memfasilitasi dialog Pengurus FPK Kabupaten yang berhubungan dengan pembauran kebangsaan.
2. Menampung aspirasi anggota FPK dan aspirasi masyarakat.
3. Mendorong pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan agar lebih mengoptimalkan perannya dalam pembangunan, memelihara ketentraman masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Dengan adanya bantuan dana hibah mengoptimalkan dan memperkuat paguyuban-paguyuban untuk mensejahterakan anggota-anggota paguyuban sendiri sehingga Forum Pembauran Kebangsaan menjadi lebih maju.

III. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan adalah tersalurnya dana hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kepulauan Anambas.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

a. Pengguna Anggaran (PA) :

Nama : HERRY FAKHRIZAL, S.T

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP : 19730823 200312 1 004
 Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : SRI DEWI, SE
 Pangkat/Gol : Penata TK I / III. d
 NIP : 19790304 200604 2 009
 Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor Kegiatan : 8.01.02.2.01 dan Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.8.01.0.00.02.0000/001/2024;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
 1. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia (5.1.05.05)
 2. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 100.000.000,

VI. RUANG LINGKUP

- a. Melaksanakan koordinasi dengan FPK dalam upaya menjaga kerukunan antar etnis, meningkatkan pembauran kebangsaan, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Kepulauan;
- b. Mendeteksi isu-isu terbaru yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. Melakukan update data tokoh masyarakat di setiap kecamatan dan paguyuban;
- d. Menjalin komunikasi terus menerus dengan Forum Pembauran Kebangsaan.

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

VIII. KELUARAN

Terlaksananya Koordinasi dan pemberian dana hibah di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun 2024.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tarempa, Januari 2024

Pengguna Anggaran,



Harry Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19730823 200312 1 004